



# Pemkot Terbaik Keterbukaan Publik di DIY

**YOGYAKARTA, Joglo** - Keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban bagi pemerintah. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meraih predikat terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten/kota se-DIY.

Pemkot Yogyakarta mendapatkan total nilai 96,7 kualifikasi informatif pada ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2025 di Gedung Pracimasana Kepatihan, Kamis (27/11/2025).

Tak hanya terbaik kategori pemkab/pemkot, Kota Yogyakarta juga meraih terbaik di kualifikasi informatif untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan skor 92,25, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil skor 91,65, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian skor 90,9, dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta skor 90,2. Kemantren Wirobrajan menjadi yang terbaik kategori Kemantren/Kapanewon dengan skor 92,65.

Selain itu, pemkot menerima penghargaan untuk kategori Badan Publik Ramah Difabel. Ada juga penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Berprestasi yang diraih Pemkot Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Kemantren Wirobrajan.

Dedi Budiono menegaskan, apresiasi ini menjadi bukti komitmen Pemkot Yogyakarta dalam menjamin akses informasi bagi masyarakat.

"Penghargaan ini menggambarkan bahwa layanan di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah transparan. Artinya seluruh tata kelola pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, Pemkot Yogyakarta menyediakan data publik secara lengkap melalui *website* perangkat daerah. Termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan capaian layanan pemerintahan.

"Informasi yang tidak dikecualikan boleh diketahui masyarakat. Di *website* OPD sangat lengkap, termasuk LHKPN pejabat dan capaian layanan. Penghargaan ini membanggakan, tetapi juga menjadi pemicu semangat kami untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik," katanya.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi publik juga wujud dari indikator pemerintahan bersih. "Semakin terbuka, semakin transparan berarti pemerintahan semakin bersih. Tetapi semakin tertutup, semakin diragukan," imbuhnya.

Wakil Gubernur DIY KG PAA Paku Alam X menegaskan, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang wajib difasilitasi pemerintah secara bertanggung jawab.

"Informasi publik adalah hak. Tugas pemerintahan adalah memastikan hak itu dapat diakses dengan cara mudah, cepat, dan bertanggung jawab," jelasnya.

Ia menekankan, transparansi tidak selalu identik dengan keterbukaan sepenuhnya. Transparansi hanya mengizinkan pemerintah memilih informasi apa yang ingin disampaikan.

"Tetapi, keterbukaan mengingatkan bahwa informasi publik bukan milik institusi, melainkan masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Paku Alam X juga menyoroti pentingnya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Money) sebagai ruang refleksi dan pembelajaran.

"Monev memberi ruang untuk melihat apa yang sudah berjalan, apa yang masih tertahan, dan apa yang perlu perbaikan. Pemerintahan yang terbuka bukan berarti sempurna, tetapi yang mampu menjelaskan alasan dan proses setiap keputusannya," katanya. **(eri/amd/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005